

Peningkatan Literasi Fiskal Masyarakat Sipil melalui Sekolah Anggaran: Mendorong Efisiensi dan Transparansi Belanja APBD Lombok Timur 2025

Enhancing Civil Society Fiscal Literacy through Budget Schools: Promoting Efficiency and Transparency in the 2025 East Lombok Regional Budget (APBD)

Sandy Ari Wijaya^{1*}, Usnadi², Purnama Hadi Kusuma³, Abdul Rahman Salman Paris⁴,
Widya Hartati⁵, Ratna Yuniarti⁶

¹⁻⁶ Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

*Penulis Korespondensi: andidhot10@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 29 Oktober, 2025;

Revisi: 21 November, 2025;

Diterima: 15 Desember, 2025;

Terbit: 30 Desember, 2025.

Keywords: Budget Efficiency; Capital Expenditure; Fiscal Literacy; Public Oversight; Regional Budget.

Abstract: The Community Service (PkM) activity aimed to enhance the capacity of civil society to conduct effective public oversight of the East Lombok Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for fiscal year 2025. The "Budget School" program, organized by the Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah in collaboration with the Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) NTB and ITS Kes Muhammadiyah Selong, provided participants with a comprehensive and critical analysis of the regional budget structure and allocation patterns. The key findings highlighted notable fiscal inefficiencies, particularly the disproportionately high allocation for Employee Spending (Belanja Pegawai), which indicates an urgent need for budget reallocation toward increasing Capital Expenditure (Belanja Modal). Such realignment is essential to accelerate infrastructure development, enhance public service delivery, and ensure broader socio-economic benefits for the community. The event, conducted on September 25, 2025, successfully improved fiscal literacy among youth and civil society actors by strengthening their understanding of fiscal governance and legal oversight mechanisms. Overall, the activity fostered collective awareness and encouraged active participation in promoting sustainable, transparent, and efficient regional financial management.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan publik yang efektif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025. Program "Sekolah Anggaran" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB dan ITS Kes Muhammadiyah Selong memberikan analisis yang komprehensif dan kritis mengenai struktur serta pola alokasi anggaran daerah. Temuan utama menunjukkan adanya inefisiensi fiskal yang signifikan, khususnya pada alokasi Belanja Pegawai yang relatif tinggi dan tidak proporsional, sehingga mengindikasikan perlunya realokasi anggaran secara mendesak ke arah peningkatan Belanja Modal. Penyesuaian ini penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada 25 September 2025 ini berhasil meningkatkan literasi fiskal di kalangan pemuda dan masyarakat sipil melalui penguatan pemahaman terhadap tata kelola fiskal dan mekanisme pengawasan hukum. Secara keseluruhan, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan efisien.

Kata Kunci: APBD; Belanja Modal; Efisiensi Anggaran; Literasi Fiskal; Pengawasan Publik.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan lokal yang efektif. Undang-undang mengatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta harus mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik. Kerangka hukum di Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan perlunya pengawasan yang ketat terhadap implementasi anggaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Pengawasan ini tidak terbatas pada lembaga resmi negara, melainkan juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diinisiasi sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawalan publik terhadap APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 (Wijaya, 2025). Keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam mekanisme pengawasan ini, sebagaimana ditekankan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur, Irwan Hidayat. Menurutnya, tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat memantau secara efektif arah kebijakan belanja daerah (Wijaya, 2025). Pengawasan oleh pemuda dan aktivis masyarakat sipil berfungsi sebagai garda terdepan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan dan efisien, sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan. PkM ini secara eksplisit bertujuan mengawal agar anggaran lebih berpihak pada kepentingan public (Wijaya, 2025).

Alokasi APBD Lombok Timur 2025 telah menimbulkan sorotan serius, memicu kekhawatiran mengenai ketidakseimbangan postur anggaran. Kritik utama diarahkan pada potensi inefisiensi yang menghambat alokasi sumber daya ke sektor-sektor produktif. Analisis kritis yang disampaikan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menyoroti perlunya efisiensi sebagai kunci strategis untuk memastikan belanja daerah dapat menyentuh sektor-sektor yang memberikan dampak langsung pada masyarakat. Secara spesifik, Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, mengidentifikasi bahwa alokasi Belanja Pegawai daerah masih dianggap "boros". Dalam konteks analisis fiskal, proporsi Belanja Pegawai yang tinggi menandakan tekanan fiskal yang besar pada maintenance cost (biaya pemeliharaan) birokrasi rutin, yang mengurangi ketersediaan investment cost (biaya investasi) untuk pembangunan.

Dampak langsung dari inefisiensi ini adalah terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah dan FITRA NTB mendesak pemerintah daerah untuk memperbesar porsi

Belanja Modal (Wijaya, 2025).¹ Belanja Modal secara definitif adalah belanja untuk pengadaan aset strategis, termasuk jalan, jaringan irigasi, dan bangunan, yang merupakan instrumen utama untuk peningkatan kesejahteraan publik dan kapasitas daerah. Dengan mengidentifikasi masalah ketidakseimbangan postur ini, PkM menetapkan kerangka kerja untuk advokasi dan edukasi publik yang berorientasi pada realokasi anggaran yang lebih produktif.

2. METODE

Pendekatan dan Desain PkM

Kegiatan pengabdian ini menggunakan desain edukasi berbasis aksi (Action-based Education), yang bertujuan ganda: mentransfer literasi fiskal yang mendalam dan memobilisasi potensi gerakan kolektif masyarakat sipil. Desain ini diyakini mampu mengubah pengetahuan teoretis menjadi kemampuan advokasi praktis.

Kegiatan inti adalah "Sekolah Anggaran" yang bertajuk “Membedah Anggaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025” (Wijaya, 2025). Kegiatan ini dilaksanakan melalui serangkaian sesi yang sangat terstruktur, meliputi pemaparan analisis data fiskal, tinjauan kerangka hukum, dan sesi diskusi interaktif. Metode ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis dan menyamakan persepsi mengenai temuan-temuan anggaran. Acara diselenggarakan selama satu hari pada 25 September 2025, bertempat di Kampus Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan (ITSKes) Muhammadiyah Selong.

Aktor Kolaborasi dan Sasaran Peserta

Pelaksanaan PkM ini merupakan hasil sinergi strategis antara tiga elemen kunci dalam ekosistem pengawasan daerah:

- a. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Timur: Bertindak sebagai inisiator dan motor penggerak partisipasi pemuda dalam pengawasan anggaran (Wijaya, 2025).
- b. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB: Menyediakan keahlian teknis dan analisis kritis yang mendalam mengenai postur anggaran daerah (Wijaya, 2025).
- c. Akademisi ITSKes Muhammadiyah Selong: Menyumbangkan perspektif legal dan dukungan institusional, termasuk kehadiran dosen Hukum Bisnis, Sandy Ari Wijaya (Wijaya, 2025).

Sinergi ini esensial; FITRA menyediakan data dan teknik, sementara ITSkes menyediakan justifikasi legal, yang secara kolektif meningkatkan kredibilitas dan bobot teknis dari dorongan transparansi dan efisiensi yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Sasaran utama kegiatan ini adalah kalangan pemuda dan aktivis masyarakat sipil, kelompok yang memiliki peran strategis dan energi untuk melakukan pengawalan keuangan daerah secara aktif dan berkelanjutan (Wijaya, 2025).

Materi Edukasi Kunci

Materi edukasi disusun untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif pada dua dimensi pengawasan:

Pertama, Analisis Fiskal Kritis. Materi ini berfokus pada teknik membedah postur APBD Lombok Timur 2025, termasuk komposisi pendapatan daerah, dan secara mendalam menyoroti Belanja Operasi (khususnya Belanja Pegawai) versus Belanja Modal. Diskusi menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan perlunya penekanan Belanja Pegawai yang dianggap boros untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi investasi public (Wijaya, 2025).

Kedua, Aspek Legal Pengawasan Anggaran. Materi ini, yang disampaikan oleh Sandy Ari Wijaya, mengulas kerangka hukum yang melandasi pengawasan anggaran daerah. Pembahasan ini memastikan bahwa setiap kritik dan upaya advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil didasarkan pada koridor hukum yang berlaku, khususnya terkait regulasi tata kelola keuangan daerah (Wijaya, 2025). Pemahaman kerangka legal ini krusial untuk mentransformasi kritik menjadi *bargaining power* yang terstruktur dan sah di mata birokrasi.

3. HASIL

Temuan Analisis Postur APBD Lombok Timur 2025

Sesi analisis yang disampaikan oleh FITRA NTB menjadi hasil PkM yang paling substansial. Analisis ini mengungkapkan secara gamblang struktur pengeluaran APBD Lombok Timur 2025 yang dinilai tidak efisien, dengan fokus utama pada Belanja Pegawai yang dianggap menghabiskan terlalu banyak sumber daya fiskal.

Analisis mendalam ini menunjukkan bahwa kecenderungan anggaran yang didominasi Belanja Pegawai mengakibatkan diskrepansi signifikan antara alokasi aktual dengan prioritas pembangunan produktif yang dibutuhkan. Proporsi yang tidak proporsional ini menandakan bahwa APBD lebih diarahkan pada pembiayaan rutinitas administratif daripada investasi yang menciptakan aset publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Wijaya, 2025).

Temuan kritis ini diperkuat oleh Ramli Ernanda, yang mendesak perlunya realokasi masif untuk memperbesar porsi Belanja Modal. Belanja Modal, yang mencakup investasi pada infrastruktur fisik (jalan, irigasi, gedung), merupakan motor percepatan pembangunan dan indikator utama keberpihakan anggaran terhadap kepentingan rakyat (Wijaya, 2025). Upaya PkM ini berhasil memetakan area inefisiensi dan memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah daerah, yang disalurkan melalui tekanan publik yang teredukasi.

Pembahasan Aspek Legal dan Strategi Pengawasan Masyarakat Sipil

Salah satu capaian penting dari PkM ini adalah integrasi pemahaman fiskal dengan fondasi legalitas pengawasan. Penyajian aspek hukum oleh akademisi ITS kes menanamkan kesadaran bahwa pengawasan anggaran adalah hak yang dilindungi undang-undang. Ini bukan sekadar tindakan politis, melainkan kewajiban sipil yang berlandaskan kerangka hukum yang mengatur akuntabilitas pemerintah daerah.

Penggabungan perspektif ini menghasilkan peningkatan kekuatan tawar bagi masyarakat sipil. Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh, Pemuda Muhammadiyah kini dapat melakukan advokasi anggaran yang terstruktur. Harapan Pemuda Muhammadiyah yang disampaikan oleh Irwan Hidayat adalah agar Sekolah Anggaran ini tidak berhenti sebagai ruang edukasi, tetapi menjadi pemantik gerakan kolektif yang aktif. Gerakan kolektif ini bertujuan untuk mengawal tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil dikelola secara transparan dan efisien. Pengetahuan yang mendalam mengenai postur anggaran, dikombinasikan dengan pemahaman kerangka hukum yang berlaku, menjamin bahwa upaya pengawasan publik memiliki legitimasi yang kuat dan tidak mudah diabaikan oleh otoritas daerah.

4. DISKUSI

Secara keseluruhan, kegiatan PkM berhasil diselenggarakan dengan lancar dan kondusif, menghasilkan peningkatan literasi fiskal di kalangan peserta. Dampak PkM ini diukur bukan hanya dari transfer pengetahuan, tetapi dari potensi aksi berkelanjutan.



Gambar 1. Kegiatan workshop.

Tujuan utama kegiatan PkM ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transparansi keuangan dan hak pengawasan. Dengan menganalisis inefisiensi yang ditemukan, khususnya pada Belanja Pegawai, peserta kini memiliki alat diagnostik untuk mengevaluasi kinerja fiskal pemerintah. Literasi fiskal yang ditingkatkan ini menjadi modal sosial yang penting bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses perencanaan APBD selanjutnya (seperti dalam Musrenbang) atau mengawal realisasi anggaran yang sedang berjalan. Pengawasan yang didasarkan pada data dan pemahaman teknis akan mendorong Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan pro-rakyat di masa depan, sesuai dengan harapan untuk melihat keuangan daerah dikelola secara transparan, efisien, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya jawab.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat “Sekolah Anggaran: Membedah Anggaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025” telah berhasil meningkatkan literasi fiskal serta kesadaran pengawasan di kalangan pemuda dan aktivis masyarakat sipil di Lombok Timur. Melalui kegiatan ini, teridentifikasi secara kritis bahwa APBD Lombok Timur Tahun 2025 menghadapi tantangan efisiensi yang serius, terutama akibat tingginya proporsi Belanja Pegawai yang dinilai belum optimal. Hasil analisis merekomendasikan perlunya realokasi anggaran secara signifikan untuk memperbesar Belanja Modal guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, integrasi perspektif fiskal yang disampaikan oleh FITRA NTB dan perspektif legal dari ITS Kes Muhammadiyah Selong telah membekali peserta dengan pemahaman yang komprehensif, baik dari sisi teknis maupun hukum, sebagai dasar dalam melakukan advokasi kebijakan anggaran. Capaian penting dari kegiatan PkM ini adalah kemampuannya menjadi pemantik gerakan kolektif yang aktif dalam mengawal tata kelola keuangan daerah agar berlangsung secara transparan, efisien, serta memiliki daya tawar yang kuat dalam memastikan keberpihakan anggaran kepada kepentingan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur. (2025). *Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025*. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- Bahrana, N., Nazaina, N., & Haykal, M. (2021). Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah. *J-MIND: Jurnal Manajemen Indonesia*, 6(2), Article 5228. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v6i2.5228>
- Faedlulloh, D., & Wiyani, F. (2025). Promote good governance in public financial management: The practice of local budget (APBD) transparency through open data in Jakarta Provincial Government. *Jurnal Good Governance*, 15(1), Article 41. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.41>
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. (2025). *Analisis kritis postur APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025: Perbandingan belanja pegawai dan belanja modal* [Materi presentasi Sekolah Anggaran].

- Hasanuddin, D. F., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Budget transparency and accountability in local government. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(4), 1171–1184. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878>
- Hikmah, A. A., Aisyah, P. M., & Sari, S. E. (2025). The role of local budget transparency in community participation in Tanjungpinang. *Academia Open*, 10(2), Article 12874. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12874>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/>
- Mustika, M., Afdillah, W., Sartika, R., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi anggaran publik dan implikasinya terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1245–1250. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2881>
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. (n.d.). *Kebijakan belanja daerah: Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah*. <https://bolmongkab.go.id/getfile/122>
- Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur. (2025). *Soroti postur APBD 2025, Pemuda Muhammadiyah dan FITRA NTB dorong efisiensi anggaran Lombok Timur* [Siaran pers]. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur.
- Sofadiya, O., & Biduri, S. (2024). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2), 1821–1830. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040>
- Warna, W., Hamzani, U., & Rusmita, S. (2024). Accountability and transparency of village fund budget management. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 1821–1830. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2803>
- Wibowo, A. T., & Suslianti, E. D. (2024). Pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 67–78. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.116>
- Wijaya, S. A. (2025). *Aspek legal dalam pengawasan anggaran: Peran masyarakat sipil* [Materi pemaparan Sekolah Anggaran]. ITS Kes Muhammadiyah Selong.